

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019)

Hakim¹, Umi Rosidah²
Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghozali (UNUGHA) Cilacap
e-mail: mazmurakim@yahoo.com¹, umirosidah123@yahoo.com²

Abstract

This research is a quantitative study which is taken from secondary data on financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) in Cilacap Regency. This research takes the title: "Ratio Analysis To Assess Local Government Performance Case Study at BPPKAD Cilacap Regency 2015-2019."

The purpose of this study is to determine the performance of local governments in terms of effectiveness ratios, efficiency ratios, compatibility ratios, growth ratios and independence ratios.

Based on the results of research and data analysis using financial ratio measurement tools, it shows that: (1) Regional Financial Performance of Cilacap Regency when viewed from the Effectiveness Ratio of is classified as Effective, because the average effectiveness is above 100%, namely 106.83%. (2) The financial performance of Cilacap Regency when viewed from the Efficiency Ratio of Regional Finance is already efficient, because the average ratio is less than 100%, namely 0.98%. (3) The Regional Financial Performance of Regency, when viewed from the Harmony Ratio, still allocates a lot of Operational Expenditure rather than Capital Expenditure. (4) The Regional Financial Performance of Cilacap Regency when viewed from the Growth Ratio is classified as positive. (5) Regional Financial Performance of Cilacap Regency when viewed from the Regional Financial Independence Ratio is still classified as Very Low and in the Instructive relationship pattern category.

Keyword: Ratio Analysis, Local Government Performance, Cilacap Regency

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang diambil dari data sekunder laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang berada di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini mengambil judul: "Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dilihat dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan alat ukuran rasio keuangan menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efektivitas tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 100% yaitu 106,83%. (2) Kinerja Keuangan Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya kurang dari 100% yaitu 0,98%. (3) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi dari pada Belanja Modalnya. (4) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tergolong positif. (5) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.

Kata Kunci: Analisis Rasio, Kinerja Pemerintah Daerah, Kabupaten Cilacap

A. Pendahuluan

Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan menerapkan value for money yang benar. Value for money merupakan diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi adalah penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).

Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan berupa: pendidikan, keamanan, kesehatan dan penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yaitu dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai (Abdul Halim, 2007): Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, Kontribusi sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, Kemandirian keuangan pemerintah daerah dan Pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dengan adanya program Otonomi Daerah tentunya Pemerintah Daerah memerlukan system keuangan yang baik untuk mengolah APBD yang bersifat efisien dan akuntabel. Dengan mengadakan manajemen keuangan daerah adalah salah satu kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan analisis rasio dalam menilai kinerja keuangan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap menjadi sumber informasi yang penting untuk membuat segala kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dasar penyusunan APBD Tahun 2018 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pedoman penyusunan tersebut meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2018, dengan prioritas antara lain: penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan social dasar, meyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan social dasar, penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, penguatan ketahanan pangan dan energy yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan, penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan eban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pemerdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin serta pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memerikan keberlanjutan sumberdaya alam dan resiko pengurangan resiko bencana.

Sejak diberlakukannya undang-undang No.22 Tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat, berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah dengan persetujuan DPR – RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang Keuangan Negara: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Cilacap antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi

sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

B. Tinjauan Pustaka

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) dalam melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penerapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

2. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD yaitu:

a. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- 2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.

- 4) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- 5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

b. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD adalah perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana Perimbangan
- c) Pendapatan Daerah Yang Sah

3. Laporan Keuangan

Menurut (Munawir, 2004) laporan keuangan digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dengan cara setepat - tepatnya sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan.

Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aktivitas ekonomi di Indonesia dapat dibagi ke dalam sektor privat, sektor publik dan sektor nirlaba. Khususnya di sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka menurut peneliti laporan keuangan adalah suatu data yang menunjukkan laporan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut kepada perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan dengan perusahaan bersangkutan.

4. Kinerja Keuangan Daerah

- a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2001:329), kinerja adalah suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi.

b. Penilaian Kinerja

Penilaian merupakan suatu proses atau system yang digunakan dalam menentukan nilai kuantitatif sesuai objek, perkara, atau keadaan. Nilai kuantitatif ini biasanya dinyatakan dalam suatu unit angka yang tetap dengan menggunakan alat pengukuran yang berkaitan. Penilaian kinerja merupakan suatu alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Bastian, 2001:121)

5. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut (Samryn, 2011), analisis rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi sangat berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Menurut (Harahap, 2006:297) rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas mengenai pengertian rasio keuangan, maka menurut peneliti rasio keuangan adalah hasil angka-angka yang diperoleh setelah melakukan perbandingan terhadap laporan keuangan. Ada beberapa cara untuk menilai kinerja keuangan Daerah adalah dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang digunakan yaitu: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

C. Kerangka Berfikir



D. Desain Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.7, Sidakaya Dua, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah pada BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2019”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2009:4) Penelitian ini termasuk jenis penelitian terapan (applied reseach) dengan analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif yaitu jenis

penelitian yang tidak menggunakan hipotesis di dalam penelitian dan hanya menggunakan data pendukung berupa angka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah BPPKAD Kabupaten Cilacap.

b. Sumber data

1) Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari BPPKAD kabupaten Cilacap. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Bu Indah Kabag Akuntansi di Kantor BPPKAD.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Buku Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap 2015-2019.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Table 1 Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
(X > 100%)	Efektif
(X = 100%)	Efektivitas Berimbang
(X < 100%)	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) menunjukkan tidak efektif
 - b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) menunjukkan efektivitas seimbang.
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) menunjukkan efektif.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Table 2 Kriteria Pengukuran Efisiensi

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efektivitas Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mohammad Mahsun (2011:187)

3. Rasio Kesenjangan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio pertumbuhan

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (t - 1)}$$

Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya positif. Menunjukkan bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Apabila semakin tinggi nilai TPD, PAD,

dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya negatif. Menunjukkan bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Table 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Reksohadiprojo dan Thoha (2013:82)

- Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

F. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan daerah BPPKAD Kabupaten Cilacap dalam penelitian ini merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan

pencapaian pelaksanaa kegiatan BPPKAD kabupaten Cilacap dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015-2019. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cilacap yang didapat dari Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Cilacap. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

1) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output: program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian ini pengukuran Rasio Efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4 Efektivitas Pendapatan Pemerintah
Kabupaten Cilacap

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
A	B	C	D = B/C x 100%	E
2015	409.845.660.919	380.258.085.600	107,78	Efektif
2016	428.598.349.897	387.045.051.000	110,74	Efektif
2017	648.091.381.096	612.077.977.866	105,88	Efektif
2018	527.577.740.281	497.353.613.147	106,08	Efektif
2019	574.237.631.003	553.906.636.361	103,67	Efektif

Dilihat pada tabel 4.1, di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah efektif. Rasio efektivitas tertinggi pada tahun 2016 sebesar 110,74% dan rasio efektivitas terkecil pada tahun 2019 sebesar 103,67%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 106,83%.

2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin.

Kinerja keuangan daerah kabupaten cilacap dikatakan efisien jika rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja keuangan daerah kabupaten cilacap. Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5 Efisiensi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efisien	Kriteria
A	B	C	$D = B/C \times 100\%$	E
2015	2.657.124.478.070	2.737.224.737.990	0,97%	Efisien
2016	3.150.325.840.872	2.796.010.344.654	1,13%	Tidak Efisien
2017	3.014.110.475.842	3.067.274.791.140	0,98%	Efisien
2018	2.985.422.839.102	3.072.112.464.787	0,97%	Efisien
2019	2.779.741.241.523	3.282.758.802.010	0,85%	Efisien

Sumber data: BPPKAD Kabupaten Cilacap

Dilihat pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Daerah BPPKAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 sampai dengan 2019 tergolong efisien. Namun pada tahun 2016 tidak efisien dikarenakan rasio efisiensi < 1 yaitu 1,127%. Jadi rata-rata rasionya dari tahun 2015-2019 sebesar 0,98%.

3) Rasio Kerasian

Rasio kerasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio kerasian dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

a) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6 Rasio Belanja Operasi Penerimaan Pemerintah
Kabupaten Cilacap

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
A	B	C	D = B/C x 100%
2015	2.055.974.719.265	2.657.124.478.070	0,77
2016	2.304.600.214.823	3.150.325.840.872	0,73
2017	2.360.684.842.998	3.014.110.475.842	0,78
2018	2.434.551.928.596	2.985.422.839.102	0,81
2019	2.116.420.043.517	2.779.741.241.523	0,76

Sumber data: BPPKAD Kabupaten Cilacap

Dilihat hasil perhitungan pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kesenjangan Belanja Operasi BPPKAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2015-2019. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi dapat dikatakan bahwa presentase belanja daerah yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Rasio belanja operasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,81% dan rasio belanja operasi terendah pada tahun 2016 sebesar 0,73%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 0,77%.

b) Rasio belanja modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6 Rasio Belanja Modal Penerimaan Pemerintah
Kabupaten Cilacap

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
A	B	C	D = B/C x100%
2015	582.530.966.205	2.657.124.478.070	0,22
2016	843.986.253.460	3.150.325.840.872	0,27
2017	650.972.398.792	3.014.110.475.842	0,21
2018	550.840.750.506	2.985.422.839.102	0,18
2019	663.321.198.006	2.779.741.241.523	0,24

Sumber data: BPPKAD Kabupaten Cilacap

Dilihat hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal BPPKAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2015-2019. Semakin besar rasio belanja modal dapat dikatakan semakin baik rasio keserasian pemerintah daerah. Rasio belanja modal tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,27% dan rasio belanja modal terkecil pada tahun 2018 sebesar 0,18%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 0,22%.

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rasio pertumbuhan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

Tabel 7 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah
Kabupaten Cilacap

Tahun	Pendapatan Tahun t	Pendapatan Tahun t-1	Rasio Pertumbuhan (%)
A	B	C	D = (B - C) / C
2015	2.737.224.737.990	2.367.534.100.540	0,156
2016	2.796.010.344.654	2.737.224.737.990	0,021
2017	3.067.274.791.140	2.796.010.344.654	0,097
2018	3.072.112.464.787	3.067.274.791.140	0,001
2019	3.282.758.802.010	3.072.112.464.787	0,068

Dilihat dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Rasio Pertumbuhan Kabupaten Cilacap pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2018 rasionya paling kecil sebesar 0,001% dan pada tahun 2015 rasio pertumbuhannya paling tinggi sebesar 0,156% jadi rata-rata rasionya sebesar 0,068%.

5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 8 Rasio Kemandirian Pemerintah
Kabupaten Cilacap

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
A	B	C	D = B/C x 100%	E
2015	409.845.660.919	2.737.224.737.990	0,15	Instruktif
2016	428.598.349.897	2.796.010.344.654	0,01	Instruktif
2017	648.091.381.096	3.067.274.791.140	0,21	Instruktif
2018	527.577.740.281	3.072.112.464.787	0,17	Instruktif
2019	574.237.631.003	3.282.758.802.010	0,17	Instruktif

Sumber data: BPPKAD Kabupaten Cilacap

Dilihat hasil perhitungan pada tabel 4.6 di atas kemampuan keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap. Rasio kemandirian terkecil pada tahun 2016 yaitu 0,01% dan rasio kemandirian yang paling besar pada tahun 2017 yaitu 0,21%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 0,142%.

G. Pembahasan

1. Rasio Efektivitas

Gambar 1 Efektivitas Pemerintah

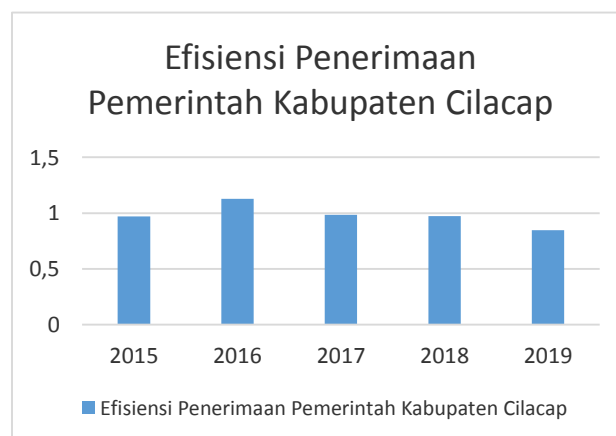


Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 sebesar 107,78%, tahun 2016 sebesar 110,74%, tahun 2017 sebesar 105,88%, tahun 2018 sebesar 106,08%, tahun 2019 sebesar 103,67%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Cilacap tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah tergolong efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Namun dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Rasio Efektivitas Kabupaten Cilacap masih naik turun pada tahun 2015 yaitu 107,78%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 110,74%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 105,88% ini disebabkan karena Realisasi Belanja Daerah yang melebihi anggaran jadi Rasio Efektivitas mengalami penurunan, kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 106,08% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 103,67% karena Realisasi Belanja Daerah lebih besar dari yang dianggarkan. Jadi Rasio Efektivitas Kabupaten Cilacap dikatakan efektif karena rata-rata Rasio Efektivitasnya di atas 100% yaitu 106,83%.

Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan Pendapatan.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Gambar 2 Efisiensi Penerimaan Pemerintah



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 0,967% atau dikatakan efisien. Pada tahun 2015 rasio efisiensinya sebesar 0,971%, kemudian tahun 2016 menjadi 1,127%, tahun 2017 sebesar 0,983%, pada tahun 2018 sebesar 0,972%, dan tahun 2019 sebesar 0,847%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 0,98%.

3. Rasio Keserasian

a. Rasio Belanja Operasi

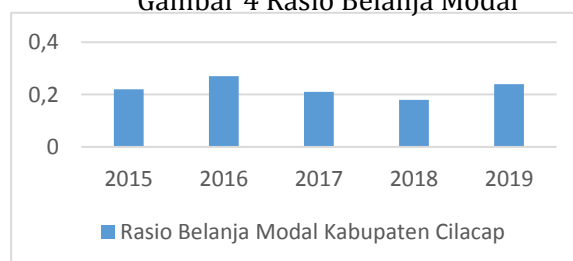
Gambar 3 Rasio Belanja Operasi



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 Rasio Belanja Operasi sebesar 0,77%, kemudian tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,73%. Tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,78%, kemudian tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,81% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,76%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 0,77%. Pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan disebabkan total belanja daerah lebih besar dari total belanja operasi.

b. Rasio Belanja Modal

Gambar 4 Rasio Belanja Modal

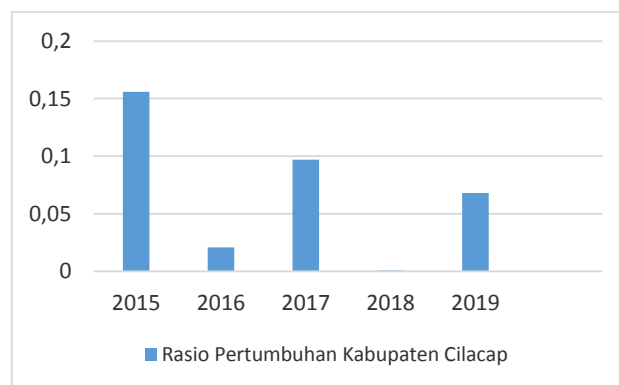


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Modal Kabupaten Cilacap dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 rasio belanja modal sebesar 0,22%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,27%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,21% dan menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 0,18% . pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,24%.

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi rata-rata rasionya sebesar 0,77% dan Rasio Belanja Modal rata-rata rasionya sebesar 0,22%. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal.

4. Rasio Pertumbuhan

Gambar 5 Rasio Pertumbuhan

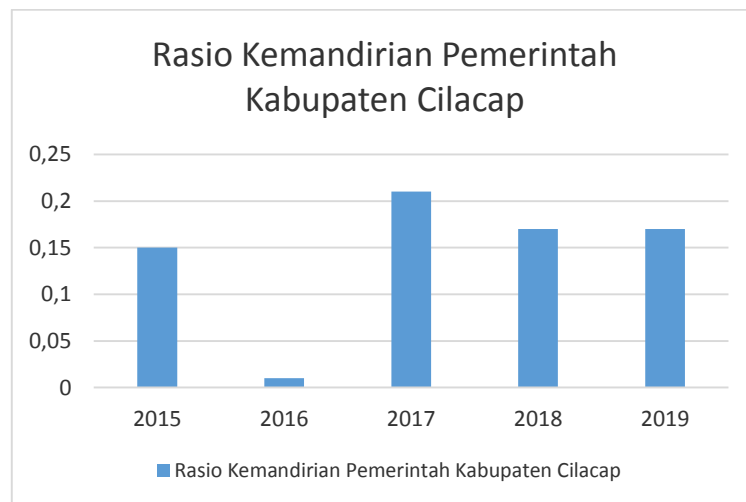


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Rasio Pertumbuhan Kabupaten Cilacap dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 Rasio Pertumbuhan sebesar 0,156%, kemudian tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,021%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,097%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,001% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,068%. Jadi rata-rata rasionya sebesar 0,068%. Pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan disebabkan karena pendapatan tahun t lebih besar dibandingkan dengan pendapatan tahun t-1.

Pada penelitian ini Rasio Pertumbuhan Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan positif. Untuk tingkat rasio pertumbuhan pendapatan yang diukur tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2018 rasio pertumbuhan pendapatan 0,01 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Cilacap.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Gambar 6 Rasio Kemandirian



Dari grafik diatas dapat dilihat Rasio Kemandirian dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 0,15%, kemudian tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,01%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,21%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,17% dan pada tahun 2019 sama seperti tahun 2018 yaitu 0,17%. Pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan disebabkan pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Cilacap rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat.

H. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efektivitas tergolong Efektif, karena rata-rata efektivitasnya diatas 100% yaitu 106,83%. Rinciannya adalah sebagai berikut: tahun 2015 sebesar 107,78%, tahun 2016 sebesar 110,74%, tahun 2017 sebesar 105,88%, tahun 2018 sebesar 106,08%, dan tahun 2019 sebesar 103,67%.
2. Kinerja Keuangan Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien, karena rata-rata rasionya kurang dari 100% yaitu 0,98%. Rinciannya adalah sebagai berikut: pada tahun 2015 rasio efisiensinya sebesar 0,971, kemudian tahun 2016 tidak efisien karena lebih dari 1/ 100% yaitu sebesar 1,127%, tahun 2017 sebesar 0,983%, tahun 2018 sebesar 0,972%, kemudian tahun 2019 sebesar 0,847%.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Keserasian masih banyak mengalokasikan Belanja Operasi daripada Belanja Modalnya.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tergolong baik karena rasio pertumbuhannya mengalami pertumbuhan positif.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif.

Daftar Pustaka

- Liantino, Wita.2018. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor BPPKAD Surakarta*.UMS
- Halim Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Mohammad Mahsun. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Pramono, Joko.2011. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta*.STIE AMA Salatiga
- Nurdiwaty, Diah, 2011, *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Kediri*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Samryn, 2011, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Pertama, Grafindo. Persada, Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta.
- Arikunto,S.2010
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Salemba Empat.

Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
Munawir, S, 2004, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi IV, Liberty, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama.
Yogyakarta:BPFE.
<https://www.e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JIABK/article/d>
<https://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com/2020/04/20/21.30>
<http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/article/download/1>
<http://ejournal.untag-smd.ac.id/index-php/EKM/>
<http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id>
<https://referensiakuntansi.blogspot.com/2020/03/05>
<ssssshhttps://jurnalilmiahmanajemen.files.wordpress.co>